



Masalah Publik

Analisis Kebijakan Publik





2

Anggota :

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Fetri Sya Agata | 1916041057 |
| 2. | Ratna Atika S. | 1916041051 |
| 3. | M. Alif Listiansyah | 1916041053 |
| 4. | Sabila Zakiyah | 1916041061 |
| 5. | Olivia Putri T. | 1946041008 |
| 6. | Rakha Aulia S. | 1946041017 |



Pengertian Masalah Publik

Masalah diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang akan menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan sebagian orang yang menginginkan perbaikan (Wirnano 2007). Sedangkan publik merupakan suatu hal yang menyangkut orang banyak atau berhubuga dengan masyarakat. Jadi Masalah publik juga dapat diartikan masalah yang memiliki dampak yang cukup luas dan melibatkan konsekuensi bagi masyarakat atau kelompok yang tidak terlibat secara langsung.



Ciri - ciri masalah publik :



01

Interdependence



02

Artificialy



03

Subjective



04

***Dinamika masalah
kebijakan***



Kategori Masalah Publik

- Masalah publik diklasifikasikan menjadi masalah prosedural dan substantif
 - Masalah publik diklasifikasikan dari asal-usul masalah tersebut yaitu terdapat masalah luar negeri dan masalah dalam negeri.
 - Masalah publik diklasifikasikan berdasarkan pada jumlah orang yang terpengaruh serta kaitannya antara satu dengan yang lain. Yaitu masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.
- 

Proses Mengidentifikasi Masalah



Persepsi

Persepsi merupakan penerimaan (receiving) dari suatu peristiwa yg punya konsekwensi terhadap orang/kelompok



Definisi

Definisi merupakan interpretasi dari peristiwa2 tersebut, memberinya makna dan membuatnya menjadi jelas.



Dan secara umum, proses mengidentifikasi masalah akan di lalui seperti berikut :

- Mengurai pertanyaan tentang tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurai informasi dan gambaran pasti terkait suatu masalah.
 - Mencari sumber masalah. Hal ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan dan di gunakan untuk menjabarkan darimana saja sumber masalah tersebut.
 - Menciptakan kalimat isu. Kalimat isu harus di buat dengan kalimat yang mudah di pahami oleh para pembaca dan harus di lakukan dengan teknik yang mendalam dan dengan riset beserta analisis yang berdasarkan dengan fakta yang ada dan telah di temukan lapangan.
- 
- 

Metode perumusan masalah :



Analisis batas



***Analisis
klasifikasi***



Analisis Hirarki



Brainstroming



***Analisis
perspektif ganda***

Tipologi

Elemen	Struktur Masalah		
	Terstruktur Baik	Agak Terstruktur	Tidak Terstruktur
Pembuat Kebijakan	Satu atau beberapa	Satu atau beberapa	Banyak
Alternatif	Terbatas	Terbatas	Tak Terbatas
Kegunaan (nilai)	Konsensus	Konsensus	Konflik
Probabilitas	Dapat dihitung	Sulit dihitung	Sangat sulit dihitung
Contoh	Penghentian PNS	Pembebasan tanah	Kemiskinan Kriminalitas

The slide features a light beige background with decorative illustrations of autumn leaves and small berries in the corners. The leaves are in shades of brown and tan, and the berries are small and round, some with green and some with brown. The title is written in a large, elegant, black cursive font.

Karakteristik masalah publik

- Saling ketergantungan (interdependensi)
- Subyektivitas hasil analisis dalam konteks lingkungan tertentu
- Sifat buatan (artificiality) suatu situasi dianggap masalah karena ada keinginan untuk mengubah situasi tersebut.
- Dinamika masalah kebijakan masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau konteks lingkungannya berbeda.

Tipe - tipe masalah publik



Menurut Charles O Jones, ada dua tipe masalah publik: yaitu masalah tersebut dikarakteristikkan oleh adanya perhatian kelompok yang bertujuan untuk melakukan tindakan. Dan masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisir dan kurang mendapat dukungan.

Tipe - tipe masalah publik



elemen	Struktur masalah		
	Terstruktur dengan baik	Agak terstruktur	Tidak terstruktur
Pembuat kebijakan	Satu atau beberapa	Satu atau beberapa	banyak
alternatif	terbatas	terbatas	Tidak terbatas
Kegunaan (nilai)	konsensus	konsensus	konflik
	Dapat dihitung	Sulit dihitung	Sangat sulit dihitung

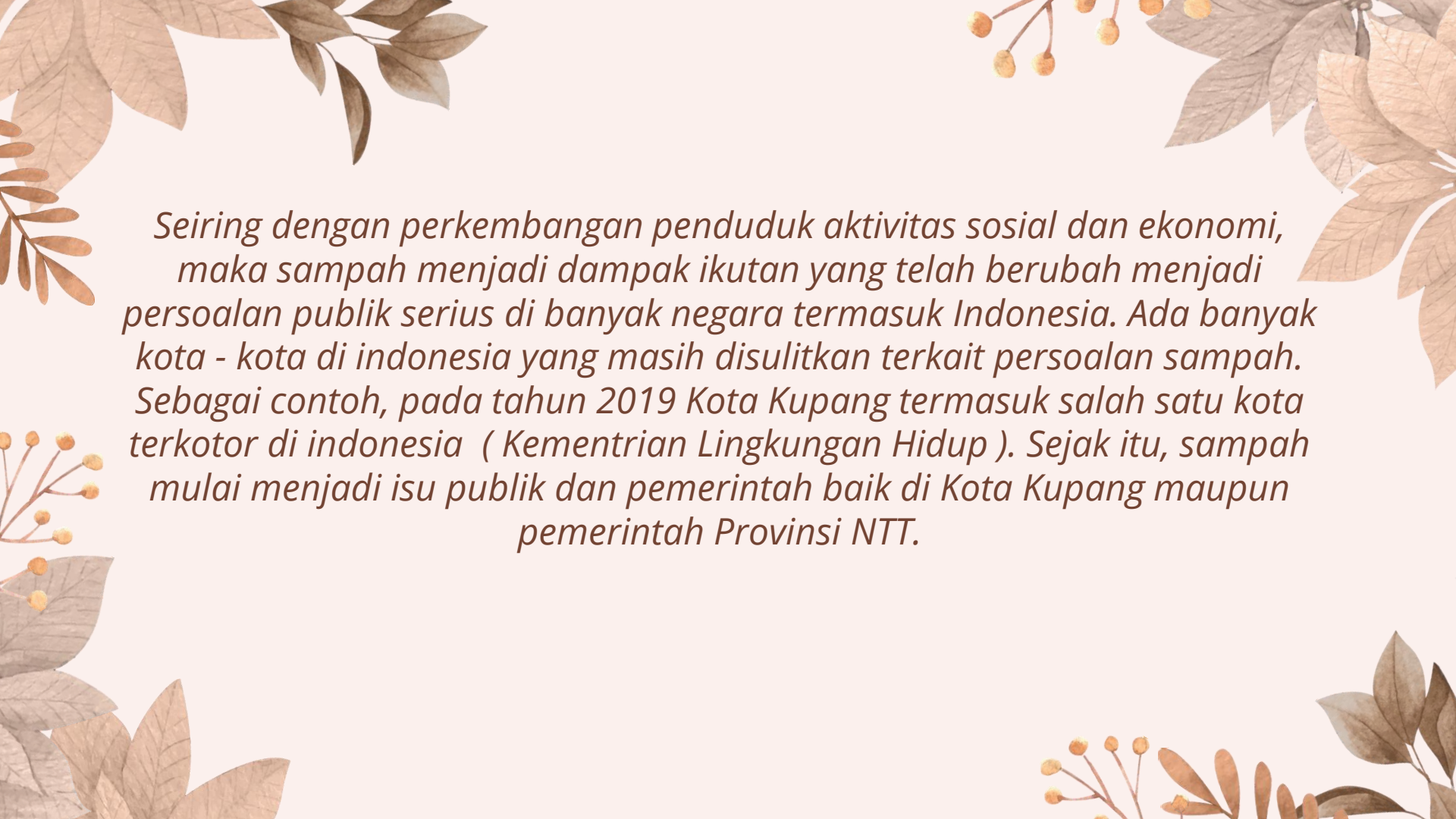
Menurut William N. Dunn



Contoh Kasus

***Kewargaan dan
Kolaborasi pemecah
masalah publik : Studi
isu sampah kota
Kupang***



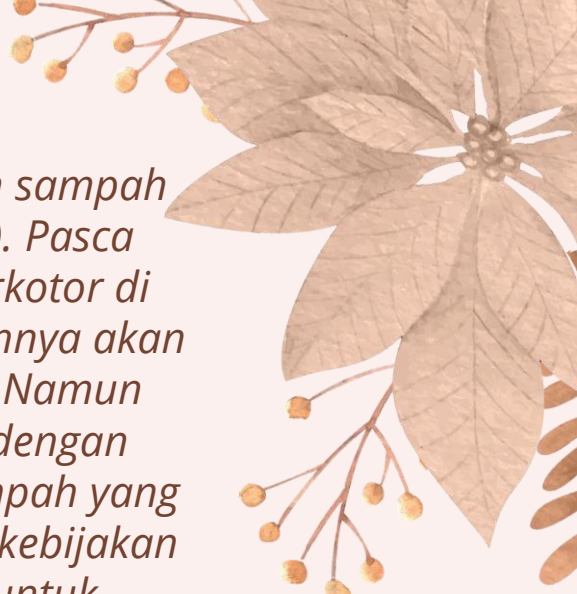
The image features a light beige background with decorative elements in the corners: brown and tan autumn leaves and small yellow-orange berries. The text is centered in a brown, cursive-style font.

Seiring dengan perkembangan penduduk aktivitas sosial dan ekonomi, maka sampah menjadi dampak ikutan yang telah berubah menjadi persoalan publik serius di banyak negara termasuk Indonesia. Ada banyak kota - kota di indonesia yang masih disulitkan terkait persoalan sampah. Sebagai contoh, pada tahun 2019 Kota Kupang termasuk salah satu kota terkotor di indonesia (Kementrian Lingkungan Hidup). Sejak itu, sampah mulai menjadi isu publik dan pemerintah baik di Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi NTT.



Menyikapi permasalahan sampah yang kian membesar. Pemerintah Kota Kupang telah memiliki kerangka regulasi untuk menangani sampah di kota ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Perda ini diatur sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yakni Bab XV dengan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 24 ayat 1 dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000. Namun perda ini dirasa belum mampu memberikan dampak kepada setiap masyarakat nya, maka dari itu sampah semakin hari semakin bertambah.





Selain itu, respon kebijakan terhadap permasalahan sampah cenderung reaktif dan tidak komprehensif (parsial). Pasca penetapan Kota Kupang sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore meresponnya akan menyelesaikan permasalahan sampah satu bulan. Namun pilihan strateginya cenderung sangat teknis yaitu dengan mengerahkan seluruh ASN untuk membersihkan sampah yang ada. Kebijakan parsial lainnya yang nampak adalah kebijakan Walikota yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyediakan tong sampah di setiap halaman tempat usaha mereka. Kebijakan ini nampak tidak efektif karena sifatnya yang cenderung menjadi himbauan dan pada batas tertentu tidak tersosialisasi secara baik kepada para pengusaha yang ada di Kota Kupang.



Kesimpulan :



Untuk itu pemerintah setempat harus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan yang diberlakukan diterapkan dengan baik atau tidak.

Selain itu dengan adanya evaluasi maka pemerintah setempat juga bisa melihat dibagian mana saja permasalahan yang ada cenderung tidak berkurang atau malah melonjak. Hal ini didasari karena kebijakan - kebijakan tersebut tidak serta merta akan langsung memberikan efek atau dampak yang baik ketika diterapkan. Harus ada pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk melengkapi hal tersebut.





Terima
kasih